

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Edisi Kelima. Kencana: Jakarta.
- Amruddin, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Pradina Pustaka: Sukoharjo.
- Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan (Buku Ajar)*. MIH Unihaz: Bengkulu.
- C. S. T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Daeng Naja. 2023. *Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*. Cetakan Pertama. Uwais Inspirasi Indonesia: Sidoarjo.
- Dani Nur Saputra, dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Feniks Muda Sejahtera: Palu.
- Djarwanto. 1994. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Liberty: Yogyakarta.
- D. Y. Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Mandar Maju: Bandung.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. UWKS Press: Surabaya.
- Fauzi. 2016. *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*. Cetakan Kesatu. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Ferry Gunawan C. 2018. *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Alumni: Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Imron Rosyadi. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*. Cetakan Kesatu. Kencana: Depok.
- Indra Rahmatullah. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Cetakan Pertama. Deepublish: Yogyakarta.
- Jujun S. Suriasumantri. 2001. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Cetakan Kesatu. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya: Bandung.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Laksbang Yustisia: Surabaya.
- Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Cetakan Pertama. *Social Politic Genius (SIGn)*: Makassar
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*. Alumni: Bandung.
- Putri Ayi Winarsasi. 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing: Surabaya.
- R. Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Jakarta.

- , 1989. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.
- Salim H. S. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan Keempat belas. Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan Kedua Belas. Sinar Grafika: Jakarta.
- dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sanusi, Kus Rizkianto, dan Imam Asmarudin. 2017. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Cetakan Pertama. Diya Media Group: Jawa Tengah.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Siti Malikhatun Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cetakan Keempat. Liberty: Yogyakarta.
- , 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*. Cetakan Kelima. Liberty Offset: Yogyakarta.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca: Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif. 1984. *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sutarno. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta: Bandung.
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Cetakan Kesatu. Mandar Maju: Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Sebelum Perubahan).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Sesudah Perubahan).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia *juncto* Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

PUTUSAN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Kasasi Nomor 1238 K/Pdt/2017.

Putusan Kasasi Nomor 2612 K/Pdt/2020.

JURNAL:

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Permasalahan Konstitusionalitas Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia yang disamakan dengan Putusan Pengadilan". Jurnal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Volume 19 Nomor 3 September 2022.

I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, dan I Gusti Ayu Kartika. "Menguji Asas *Droit De Suite* Dalam Jaminan Fidusia". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 4 Nomor 3 September 2015.

Marwah, Nurfaidah Said, and Fildanasari. 2020. "*The Role Of "Mantri" in Reporting the Feasibility Data of the Prospective Debtor and Its Effect on the Number of Bad Loans*". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Atlantis Press. Hasanuddin University. Vol. 499: 217-224.

Tutiek Retnowati Markum. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia yang Kemudian Dirampas Untuk Negara Dalam Kasus Illegal Logging". Jurnal Sapientia et Vertus. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Vol. 2 Nomor 1 Maret 2015.

LAPORAN PENELITIAN:

Marulak Pardede *et al.* 2006. Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Laporan Penelitian. BPHN. Jakarta.

INTERNET:

Joji Maning. Blog Gramedia Digital. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/> diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 12.10 WITA.

Admin. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*. <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 18.00 WITA.

Uceo. Program Studi Informatika Universitas Ciputra. *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*. <https://informatika.uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 23.50 WITA.

Lulu Anjarsari, Nur R., dan Andhini SF. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2> diakses pada tanggal 05 Februari 2023 pukul 09.45 WITA.

Bernadetha Aurelia Oktavira. HukumOnline.Com. *Mengenal Jaminan Perorangan Corporate Guarantee, dan Bank Garansi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-1t519d0870c12f3> diakses pada tanggal 05 Maret 2023 pukul 20.00 WITA.

WAWANCARA:

Hasil wawancara dengan Muhammad Al Jebra Iksan Rauf, Advokat pada Kantor PBH PERADI, Makassar, 05 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Abd. Gaffur. Advokat pada Kantor PBH PERADI. Makassar. 11 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Anwar Borahima. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 23 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Franklin B. Tamara. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus. Makassar. 25 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Rani Saskia. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Via *Video Call WhatsApp*. 26 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Jahoras Siring-Siringo. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus. Makassar. 28 September 2022.

ANGKET (KUESIONER):

Hasil angket (kuesioner) Nanang Priyanto. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulukumba. Via *Chat WhatsApp*. 05 September 2022.

Hasil angket (kuesioner) Yodi Kristianto. Advokat pada Firma Hukum YK & Partners. Via *Chat WhatsApp*. 08 September 2022.

Muhadar. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 26 Januari 2023.

LAMPIRAN



**PUSAT BANTUAN HUKUM
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
KOTA MAKASSAR**

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/SK-PBH/VIII/2022**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : STEFANY

Prog. Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Alamat : Jl. Bunga Dahlia No. 5 Baubau, Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan penelitian berupa wawancara terhadap Pengurus PBH PERADI Makassar.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Agustus 2022

Sekretaris PBH PERADI Makassar

ABD. GAFFUR I, S.H.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 29 September 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 117 /PB.01/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Stefany.**
Nomor Pokok : B011171576
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : Jl. Bunga Dahlia No. 5, Baubau, Sulawesi Tenggara
Judul : **Kepastian Hukum Prinsip “Droit De Suite”
Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang
Dirampas Untuk Negara.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 September 2022 sampai dengan 28 September 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 16 September 2022 Nomor : 8035/UN4.5.1/PT.00/2022.



WAKIL KETUA

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin